

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi wisata yang dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Sektor ini merupakan salah satu yang paling berpotensi di Indonesia, dengan potensi yang ada dapat mendorong pengembangan wisata serta memberikan dampak positif terhadap pendapatan, terutama melalui pengembangan pariwisata di desa-desa. Contoh nyata dapat ditemukan di berbagai objek wisata di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Provinsi ini kaya akan berbagai destinasi wisata yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan beragam potensi desa wisata. Salah satu bentuk pembangunan pariwisata yang bertujuan untuk mendorong perkembangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pengembangan desa wisata, yang merupakan jenis pariwisata alternatif.¹

Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan pariwisata yang mengedepankan potensi budaya, alam, dan sosial, serta keunikan yang dimiliki oleh suatu desa atau masyarakat pedesaan. Setiap daerah yang ditetapkan sebagai desa wisata perlu memperhatikan potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Tentu saja, sektor pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan

¹ Dian Herdiana, 2019. "Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat". *Jurnal Master Pariwisata*, 6(1). Hlm. 64.

daerah.² Pengelolaan desa wisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi dari pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata tersebut.

Peneliti mengamati komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata, yang tercermin dari meningkatnya minat terhadap desa wisata sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dokumen ini mencakup sebagian dari program pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara.³ Meskipun pengelolaan desa wisata sudah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala di berbagai sektor, terutama selama masa pandemi.⁴

Selama pandemi *Coronavirus disease* (COVID-19) pada tahun 2019, pemerintah meluncurkan berbagai program yang berkaitan dengan desa wisata, salah satunya adalah Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Program ini berfungsi sebagai sarana promosi potensi desa wisata di Indonesia dan diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) pada tahun 2021.⁵ Ketika program ADWI pertama kali

² Aji, Riswandha Risang, Retno Widodo Dwi Pramono, & Dwita Hadi Rahmi, 2018. "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Ekonomi Wilayah Di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Planoearth*, 3(2). Hlm. 57.

³ Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

⁴ *Website* Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021, "Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas", <<https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas>>, [diakses 15 Oktober 2023].

⁵ Humas ekon.go.id, 2021, "Pembangunan Kepariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi", <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>>, [Diakses 25 Oktober 2023].

dilaksanakan banyak pihak yang mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar tepat ditengah memburuknya kondisi perekonomian global akibat pandemi. Program ini bertujuan untuk mendorong pengembangan dan memberikan penghargaan kepada desa-desa wisata di Indonesia yang berhasil mengembangkan potensi pariwisatanya secara berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya.

Proses seleksi Anugerah Desa Wisata Indonesia melibatkan berbagai kriteria yang ditetapkan oleh Kemenparekraf dan tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kriteria tersebut meliputi:⁶ 1) Desa Wisata harus memiliki potensi daya tarik wisata yang berasal dari alam, buatan, dan budaya; 2) adanya potensi sumber daya manusia lokal yang dilibatkan dalam pengembangan desa wisata; 3) adanya komunitas masyarakat; 4) penilaian berdasarkan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung; 5) setiap Desa Wisata harus memiliki potensi untuk mempromosikan dirinya kepada wisatawan; 6) serta dilihat dari aspek kelembagaan pengelolaan Desa Wisata.

Desa wisata yang berhasil memenuhi kriteria tersebut akan dievaluasi dan dipilih sebagai penerima penghargaan. Sebagai pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), mereka tidak hanya mendapatkan pengakuan atas prestasinya, tetapi juga menerima dukungan tambahan dari pemerintah berupa bantuan teknis, pelatihan, infrastruktur, dan promosi pariwisata. Oleh karena itu, program ADWI

⁶ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia serta meningkatkan peran dan kontribusi desa wisata terhadap perekonomian lokal dan pelestarian budaya. Seiring dengan perkembangan pariwisata, program ADWI juga terus mengalami berbagai perubahan. Pada tahun 2023, Anugerah Desa Wisata Indonesia dibagi menjadi dua kategori: Desa Wisata Terbaik dan Desa Wisata Terfavorit. Selain itu, terdapat indikator penilaian lainnya, seperti daya tarik pengunjung, *homestay* dan toilet, aspek digital dan kreatif, *souvenir*, kelembagaan desa wisata, serta CHSE (*Clean, Health, Safety, and Environment*).⁷ Terdapat perbedaan dalam penilaian desa wisata pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu adanya klasifikasi terbaru yang membedakan desa wisata menjadi desa wisata maju, desa wisata berkembang, dan desa wisata rintisan.

Sebanyak 4.573 desa wisata dari berbagai daerah di Indonesia berpartisipasi dalam ADWI 2023, termasuk Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah dengan potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata serta memiliki berbagai destinasi wisata. Dalam program ADWI tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat mengajukan 327 desa wisata untuk bersaing dengan desa-desa lainnya, di mana desa-desa yang terpilih memiliki peluang untuk meraih penghargaan tersebut. Pada malam puncak penghargaan yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 2023,

⁷ Jadesta, 2023, "Kategori Penilaian ADWI 2023", <<https://jadesta.kemenparekraf.go.id>>, [diakses 25 Oktober 2023].

lima desa dari Provinsi Sumatera Barat berhasil masuk dalam daftar 75 desa wisata terbaik ADWI 2023, seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:⁸

Tabel 1.1
Lima Desa Wisata Sumbar yang Berhasil Masuk 75 besar ADWI 2023

Kabupaten/ Kota	Desa Wisata
Kabupaten Padang Pariaman	Desa Wisata Nyarai
Kota Padang Panjang	Desa Wisata Kubu Gadang
Kabupaten Sijunjung	Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung
Kabupaten Agam	Desa Wisata Lawang
Kabupaten Kepulauan Mentawai	Desa Wisata Muntei

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2023

Tiga dari lima desa wisata tersebut meraih juara 1 yaitu Desa Wisata Lawang di Kabupaten Agam dengan kategori *Homestay* dan Toilet Terbaik; Desa Wisata Muntei di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada kategori Daya Tarik Pengunjung dan Desa Wisata Terbaik kategori Berkembang diraih Desa Wisata Kampung Adat di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan dua desa wisata lagi meraih juara harapan, yakni Desa Wisata Nyarai di Kabupaten Padang Pariaman kategori Daya Tarik Pengunjung dan Desa Wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang kategori Desa Wisata Maju.⁹

Dengan kategori ini, peneliti tertarik pada salah satu desa wisata yang meraih juara pertama di Sumatera Barat, yaitu Desa Wisata Lawang di Kabupaten Agam, yang berhasil dalam kategori *homestay* dan toilet. Keberhasilan program ini sering kali melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, yang

⁸ Miko Elfisha, 2023, "Ini lima desa wisata Sumbar yang berhasil masuk 75 besar ADWI 2023", *Antara Sumbar*. <<https://sumbar.antaranews.com/berita/560265/ini-lima-desa-wisata>>, [diakses 25 Oktober 2023].

⁹ Humas, 2023, "Selamat! Inilah Pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023", *Apkasi*. <<https://apkasi.org/nasional/selamat-inilah-pemenang-anugerah-desa-wisata-indonesia-adwi-2023/>>, [Diakses 10 November 2023].

berperan penting dalam pengembangan desa wisata. Kolaborasi ini memungkinkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama dalam merencanakan, mengelola, dan mempromosikan destinasi wisata melalui tata kelola kolaboratif. Hal ini dapat menghasilkan destinasi wisata yang lebih berkualitas serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Penelitian mengenai *collaborative governance* yang berkaitan dengan pengembangan suatu kawasan wisata telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda. Pertama, penelitian Dwi Alamsyah, et.al¹⁰ menunjukkan tahapan yang dilakukan dalam proses kolaborasi yaitu adanya musyawarah dengan pemerintah, masyarakat dan pengelola. Selanjutnya mengadakan pelatihan pengembangan sumber daya alam dan pembuatan tempat sampah di lokasi wisata. Selain itu, menyediakan pamong wisata dan mengadakan forum sosialisasi. Kedua, penelitian Putu Nomy Yasintha¹¹ yang menunjukkan kolaborasi antar *stakeholder* berhasil mengundang banyak wisatawan, tetapi promosi yang diberikan ke pengunjung atau wisatawan lokal masih minim. Kolaborasi dalam pengembangan wisatanya pun hanya mengandalkan pemerintah saja dan kurang optimal dalam membangun relasi antar *stakeholder*.

¹⁰ Dwi Alamsyah, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, & Ansyari Mone, 2019, "Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara", *Fisipublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2). Hlm. 112-127.

¹¹ Putu Nomy Yasintha, 2020, "Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1). Hlm. 1-23.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menganalisis mengenai *collaborative governance*, khususnya terkait dengan upaya kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Desa Wisata Lawang di Kabupaten Agam dalam program Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Desa Wisata Nagari Lawang menerapkan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Kolaborasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan *homestay* dan fasilitas, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta promosi desa wisata. Selain itu, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Teori ini memiliki model *collaborative governance* yang terdiri dari empat variabel, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi.¹² Hal ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proses *collaborative governance* oleh para aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lawang.

1.2 Rumusan Masalah

Desa Wisata Lawang memiliki daya tarik destinasi wisata alam yang menawan dan kaya akan budaya serta tradisi masyarakat Minangkabau. Pada tahun 2017, pengembangan desa wisata Lawang masih berada pada tahap awal, dan kondisinya masih tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Agam. Pengembangan ini dimulai dari inisiatif sekelompok pemuda dan masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraan melalui pariwisata. Sektor

¹² Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press. Hlm. 41.

pariwisata dianggap sebagai salah satu bidang yang dapat diandalkan dalam pengembangan ekonomi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi komunitas lokal dan lingkungan sekitarnya.¹³ Dalam pengembangan desa wisata Lawang, peran pemerintah serta keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang dapat mewujudkan desa wisata Lawang yang berkelanjutan.

Salah satu contoh sebelum terjadinya kolaborasi adalah pembangunan objek wisata bernama *Lawang Park* dan Puncak Lawang. Namun, dalam prosesnya, mereka menghadapi tantangan sosial budaya di Nagari Lawang, seperti kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya tindakan asusila jika tempat wisata tersebut dibuka untuk umum. Tokoh kunci dalam pengembangan wisata di Nagari Lawang adalah seorang anak nagari yang pulang dari perantauan, yaitu Muhammad Zuhrizul, yang akrab dipanggil *Mak Etek*. Beliau melihat potensi di balik keindahan alam Nagari Lawang. Oleh karena itu, beliau berusaha merancang konsep wisata yang tidak hanya menarik bagi pengunjung, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai adat. Dengan melibatkan tokoh agama, *niniak mamak*, dan pemuda setempat, ia berhasil meyakinkan bahwa potensi wisata ini dapat menjadi pendorong perekonomian masyarakat setempat, asalkan dikelola secara bijaksana dan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pengelolaannya.¹⁴

¹³ Rahmi, Siti Atika, 2016, "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal", *Reformasi*. 6(1). Hlm. 81.

¹⁴ Wawancara dengan Tommy TRD, mantan Camat Matur Kabupaten Agam Tahun 2017-2018 Pada Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB.

Dalam proses pembangunan objek wisata ini, dibentuklah sebuah lembaga bernama “Forum Agro Wisata Nagari Madani Matur” yang disingkat FAWNMM. Pembentukan forum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah nagari, tokoh masyarakat, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dasar dari pembentukan forum ini adalah untuk menghasilkan program-program yang berfokus pada pembangunan dan pengembangan pariwisata di Nagari Lawang secara berkelanjutan. Karena pengembangan objek wisata belum sepenuhnya dioptimalkan, forum ini dibentuk untuk membantu mengatasi masalah kepariwisataan di Nagari Lawang.¹⁵ Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika perkembangan pariwisata di Nagari Lawang, forum ini digantikan oleh peran Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), yang dibagi menjadi delapan komunitas, masing-masing dengan fokus yang berbeda. Kolaborasi antara para pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan pariwisata di Nagari Lawang.

Sejalan dengan itu, untuk menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, Ketua Pokdarwis Manih Sarumpun Desa Wisata Lawang, Zilfaroni, mengungkapkan dalam berita di laman resmi RRI Bukittinggi bahwa Wali Nagari Lawang memberikan dukungan penuh kepada gerakan Pokdarwis ini. Dukungan tersebut dibuktikan dengan pemberian legalitas dari Pemerintah Nagari Lawang melalui SK yang telah ditetapkan. Selain itu, Zilfaroni juga menyatakan bahwa kehadiran Desa Wisata Lawang mencerminkan

¹⁵ Putri, Occa Rahdatul Oma Elfa. 2020. “Perancangan Promosi Soul Puncak Lawang Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Melalui Video Iklan.” *Thesis: Universitas Komputer Indonesia*.

sinergi antara semua unsur di Nagari Lawang, termasuk Pokdarwis, masyarakat, *niniak mamak*, dan tokoh masyarakat untuk mendukung program Desa Wisata ini selama tidak bertentangan dengan norma adat dan agama. Beliau juga menambahkan bahwa Desa Wisata Lawang bukan sekadar destinasi wisata, tetapi merupakan hasil kolaborasi dari seluruh komponen di daerah tersebut.¹⁶

Pengembangan Desa Wisata Lawang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata yang berkembang dengan menerapkan sapta pesona kepada masyarakat Nagari Lawang sebagai tuan rumah. Sapta pesona adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi wisata yang dimiliki.¹⁷ Penerapan sapta pesona di Nagari Lawang dimulai sejak tahun 2018 dengan melibatkan berbagai unsur, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat Nagari Lawang dan Pokdarwis Manih Sarumpun, termasuk penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai sapta pesona, pembersihan lingkungan desa secara rutin, serta pelatihan bagi masyarakat tentang keramahan dan pelayanan kepada wisatawan.¹⁸

¹⁶Ahmad Ikhsan, 2023, "Desa Wisata Lawang, Kolaborasi Keindahan Alam dan Kebiasaan Masyarakat", *RRI Bukittinggi*, <<https://www.rri.go.id/sumatera-barat/daerah/207964/desa-wisata-lawang-kolaborasi-keindahan-alam-dan-kebiasaanmasyarakat>>, [diakses 16 Oktober 2023].

¹⁷ Rahmawati, S.W., Sunarti, & Hakim, L., 2017. "Penerapan Sapta Pesona Pada Desa Wisata: Analisis Persepsi Wisatawan atas Layanan Penyedia Jasa di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Puntun, Kota Batu". *Tesis: Brawijaya University*. 50(2). Hlm. 197.

¹⁸ Kaba Nagari, 2023. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Pelaku UMKM. Website Resmi Nagari Lawang. Tersedia di: <https://www.nagarilawang.id> [Diakses 20 Oktober 2023].

Dari perspektif kelembagaan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat memiliki peran masing-masing. Pemerintah berperan penting dalam mengatur program desa wisata dengan memberikan bantuan dan dukungan finansial, serta mengembangkan infrastruktur yang diperlukan. Pihak swasta, seperti perusahaan pariwisata, villa atau penginapan, restoran, dan usaha terkait lainnya, juga berkontribusi dalam hal investasi, promosi, dan pengembangan fasilitas wisata. Sementara itu, peran masyarakat setempat terkait dengan program desa wisata sangat signifikan, karena mereka menjadi tuan rumah bagi wisatawan, menawarkan pengalaman budaya, menjual produk lokal, dan berpartisipasi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat.¹⁹

Dari segi infrastruktur keterlibatan pemerintah provinsi untuk pengembangan sektor wisata menjadi langkah strategis guna mendorong pariwisata salah satunya membangun infrastruktur jalan menuju kawasan wisata. Hal ini bertujuan agar akses ke tempat wisata dapat dinikmati oleh wisatawan nantinya. Selain itu, pemerintah provinsi dapat mendukung pengembangan infrastruktur seperti papan penunjuk arah dan juga fasilitas istirahat atau *homestay* yang dikelola oleh pihak swasta. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Tommy TRD selaku mantan Camat Matur Kabupaten Agam tahun 2017-2018 yang menyatakan:

”Pemerintah provinsi memberikan bentuk dukungan untuk objek wisata dalam segi infrastruktur yaitu alokasi anggaran untuk jalan lawang, karena potensi wisatanya terlihat serius dikembangkan oleh pemerintah nagari.”²⁰

¹⁹ Handayani, F., & Warsono, H. 2017. “Analisis peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang.” *Journal of Public and Management Review*, 6(3). Hlm. 41-42.

²⁰ Wawancara dengan Tommy TRD, mantan Camat Matur Kabupaten Agam Tahun 2017-2018 Pada Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB.

Dari kutipan wawancara di atas, terlihat adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pihak swasta. Selain itu, jika infrastruktur jalan di kawasan desa terpenuhi, hal ini dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Nagari Lawang. Melanjutkan pembahasan dari segi aspek lingkungan, Pemerintah Kabupaten Agam juga memberikan dukungan dalam bentuk Sumber Daya Manusia. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam mencakup pelatihan melalui program pengembangan kampung Inggris. Lima nagari yang ditetapkan untuk mengikuti pelatihan ini adalah Nagari Lawang, Batu Palano, Biaro Gadang, Gadut, dan Manggopoh, sebagai bagian dari dukungan terhadap program pariwisata di destinasi wisata ini.²¹ Terkait hal ini sejalan dengan penjelasan oleh Bapak Tommy TRD, mantan Camat Matur Kabupaten Agam Tahun 2017-2018 yang mengatakan bahwa:

”Secara Pendidikan, anak Nagari Lawang itu sudah biasa berbahasa Inggris bahkan ada kampung Inggris yang bekerjasama dengan kampung Inggris yang ada di Pare, Kediri. Pelatihan ini dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten agar nantinya ilmu yang didapat bisa dikembangkan di nagari sendiri.”²²

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat dengan upaya pemerintah Kabupaten Agam dalam pengembangan kampung Inggris sebagai destinasi wisata dan melibatkan masyarakat menjadi pemandu wisata (*tour guide*) tidak hanya

²¹ Palupi, Tara Mustikaning, et al. 2023. “Pengembangan Program ‘Kampung Inggris’: Upaya Mendukung Pariwisata di Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2). Hlm. 179.

²² Wawancara dengan Tommy TRD, mantan Camat Matur Kabupaten Agam Tahun 2017-2018 Pada Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB.

memberikan dampak positif bagi pengalaman wisatawan, namun juga memberdayakan masyarakat setempat secara ekonomi dan sosial.

Pihak swasta juga memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, seperti *Lawang Park* dan Puncak Lawang. Selain itu, pihak swasta memberikan kesempatan kepada pegiat wisata untuk berpartisipasi dalam kelembagaan, baik di dalam maupun luar provinsi, seperti *event organizer*, pelatihan *outbound*, pelatihan bahasa untuk menjadi pemandu wisata, serta pengelolaan pertanian dan perkebunan. Setelah mengikuti pelatihan, pihak nagari menginstruksikan Pokdarwis untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh guna meningkatkan kualitas wisata nagari. Dengan menerapkan ilmu yang telah didapat, pengurus Pokdarwis di Nagari Lawang dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan atau disebut *Sustainable Development*.²³

Dalam proses kolaborasinya, hal tersebut sejalan dengan pernyataan Zilfaroni selaku ketua Pokdarwis Manih Sarumpun yang menyatakan:²⁴

”kolaborasi antar aktor di desa wisata lawang ini dapat memberikan dampak dalam pengembangan pariwisata kedepannya, membantu menciptakan lingkungan yang seimbang, pelestarian sumber daya dan pemberdayaan masyarakat setempat. Maka dari itu, dibentuklah forum agro wisata nagari madani namanya yang gunanya untuk mempermudah penyelesaian masalah kepariwisataan yang ada di Nagari Lawang.”

²³ Indah Sari Rahmaini, 2022, “Keberhasilan Pembangunan Pariwisata Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Sadar Wisata Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam)”, *Jurnal Pembangunan Nagari*, 7(2). Hlm. 141.

²⁴ Wawancara dengan ketua Kelompok Sadar Wisata Manih Sarumpun Kabupaten Agam Pada Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 14.32 WIB.

Dari kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa ini mencerminkan proses kolaborasi yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar pihak dalam pengembangan Desa Wisata Lawang. Selain itu, forum ini dibentuk menjadi beberapa komunitas yang relevan dengan penelitian ini, salah satunya adalah forum *homestay*. Pembentukan komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan *homestay* di Desa Lawang. Dengan adanya forum ini, banyak manfaat yang dapat diperoleh untuk pengembangan *homestay* di Desa Lawang. Salah satu hasil dari pembentukan forum ini adalah pengelolaan *homestay* dengan manajemen satu pintu, yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, peran Pokdarwis sebagai mitra nagari sangat penting, yaitu berfungsi sebagai perantara dan mediator antara masyarakat dan pihak swasta. Partisipasi Pokdarwis dalam peningkatan kualitas nagari dapat merevitalisasi kelembagaan komunitas di Nagari Lawang. Pelatihan untuk pengurus Pokdarwis juga melibatkan kerjasama dalam menyediakan tempat penginapan atau *homestay* bagi wisatawan, sehingga memudahkan pemilik *homestay* dalam menerima tamu. Pokdarwis Nagari Lawang memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan Pokdarwis di desa wisata lainnya, karena melibatkan sektor swasta, investor luar, dan masyarakat lokal dalam upaya bersama untuk mengembangkan berbagai destinasi wisata. Sementara itu, desa wisata lain mungkin lebih bergantung pada satu pihak atau kurang terintegrasi, Pokdarwis Nagari Lawang mampu menciptakan kemitraan yang kuat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm. 140.

Pokdarwis Nagari Lawang juga bekerja sama dengan penginapan dan *homestay* untuk menyediakan berbagai pilihan akomodasi bagi wisatawan. Pengurus Pokdarwis memberikan rekomendasi penginapan sesuai dengan anggaran wisatawan dan membantu pemilik *homestay* dalam menarik tamu, terutama bagi mereka yang belum terhubung dengan *platform digital*. Selain itu, Pokdarwis memberikan peluang untuk membantu *homestay* dalam memasarkan diri secara lebih efektif. Keberhasilan Pokdarwis Nagari Lawang menjadi contoh dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan Nagari Lawang unggul, sehingga berhasil meraih penghargaan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 di kategori toilet bersih dan *homestay*. Terlihat dari adanya peningkatan pengunjung ke Lawang, berikut merupakan tabel peningkatan pengunjung:

Tabel 1.2
Data Kunjungan Wisatawan Ke Nagari Lawang Tahun 2017-2023

Tahun	Total Kunjungan
2017	15.250 wisatawan
2018	23.000 wisatawan
2019	30.750 wisatawan
2020	12.075 wisatawan
2021	19.700 wisatawan
2022	27.625 wisatawan
2023	37.400 wisatawan

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Nagari Lawang mulai dikenal sebagai destinasi wisata alam yang menarik sejak tahun 2017. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan hingga 60,7% akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan pembatasan perjalanan dan penutupan objek wisata, memberikan dampak besar pada industri pariwisata, termasuk di Nagari Lawang. Setelah

pembatasan perjalanan dilonggarkan pada tahun 2021, jumlah wisatawan mulai meningkat lagi meskipun belum mencapai level pra-pandemi. Kenaikan jumlah wisatawan dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya pemulihan di sektor pariwisata, terutama dengan berbagai program yang meningkatkan kualitas wisata, seperti pelatihan pemandu wisata, pengelolaan *homestay* yang terintegrasi dengan *platform digital*, serta perkembangan wisata berbasis komunitas. Dengan demikian, tahun 2023 menjadi puncak pencapaian bagi Nagari Lawang.

Desa Wisata Lawang telah mengalami perkembangan yang pesat, salah satu buktinya adalah terpilihnya desa ini sebagai salah satu dari lima Desa Wisata di Sumatera Barat dalam program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023. Desa Wisata Lawang berhasil meraih penghargaan dalam ajang tersebut, dengan menyandang juara 1 di kategori penilaian yang diberikan. Penghargaan ini diserahkan pada malam apresiasi ADWI 2023.²⁶ Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat yang telah bersama-sama mengembangkan desa wisata untuk program ini. Hal ini dapat membuktikan keberhasilan implementasi konsep *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata. Kolaborasi tersebut terwujud melalui beberapa aktor yang berperan, Pemerintah Nagari Lawang melalui Wali Nagari dan perangkatnya berperan dalam memfasilitasi dan mengarahkan pengembangan pariwisata, berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Agam untuk menyediakan infrastruktur dan pendanaan yang mendukung pariwisata. Selanjutnya Pokdarwis

²⁶ Sobat Hebat Indonesia Baik, 2023, "Kemenparekraf Anugerahkan 75 Desa Wisata Terbaik ADWI 2023", *Sohib.Indonesiabaik.id*, <<https://sohib.indonesiabaik.id/article/kemenparekraf-anugerahkan-desa-wisata-terbaik-adwi-2023-SBFC8>>, [Diakses 15 Oktober 2023].

Nagari Lawang yang beranggotakan masyarakat lokal dalam mengelola objek wisata, *homestay*, serta ekonomi kreatif. Keterlibatan masyarakat melalui Pokdarwis menjadi bukti bahwa pengembangan pariwisata di Nagari Lawang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga tumbuh dari bawah dengan partisipasi penuh dari warga lokal. Keterlibatan sektor swasta pun sebagai pelaku usaha *homestay*, restoran, dan UMKM turut memperkuat ekosistem dalam memberikan dukungan finansial, inovasi, dan produk-produk lokal yang menarik wisatawan.

Peneliti berasumsi bahwa kolaborasi dalam pelaksanaan program desa wisata Lawang dengan pendekatan *collaborative governance* tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan, tetapi juga dari bagaimana pariwisata mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal yang dimulai dari pembentukan forum yang terdiri dari beberapa komunitas, sehingga desa wisata Lawang dapat meraih penghargaan tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses *collaborative governance* dalam upaya pengembangan desa wisata Lawang Kabupaten Agam tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *collaborative governance* dalam upaya pengembangan desa wisata di Lawang Kabupaten Agam tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *collaborative governance*. Selain itu, dalam pengelolaan desa wisata, faktor politik sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat setempat, serta pihak bisnis atau swasta.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada penulis, pemerintah, pihak-pihak swasta dan masyarakat yang terkait sehingga dapat menjadi bahan acuan mengenai *collaborative governance* dalam upaya pengembangan desa wisata.

